



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HADI ERWIN
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
3. NHK : 446889

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **280.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/90 m2 di KAB / KOTA KAPUAS, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 2.500 m2 di KAB / KOTA KAPUAS, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KATINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **158.000.000**

1. MOTOR, SUZUKI, SHOGUN Tahun 2005, WARISAN Rp. 1.500.000
2. MOTOR, YAMAHA LEXI MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU XENIA MOBIL PENUMPANG/MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
4. LAINNYA, SEPEDA THRILL SEPEDA GUNUNG Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
5. MOTOR, YAMAHA FINO KENDARAAN RODA 2 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **8.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **25.000.000**



F. HARTA LAINNYA

Rp. 17.600.000

Sub Total

Rp. 488.600.000

III. HUTANG

Rp. 30.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 458.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.